



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN
TAHUN 2024
KEPADA BUPATI GUNUNGKIDUL**



**KALURAHAN WUNUNG
KAPANEWON WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN TAHUN 2024

KEPADA BUPATI GUNUNGKIDUL

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya yang dikaruniakan kepada kita, Kalurahan Wunung telah menyelesaikan program kerja tahunan Pemerintah Kalurahan dan menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) Akhir Tahun Anggaran 2024. LPPKal ini di buat sebagai pelaksanaan amanat Pasal 27 huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Akuntabilitas publik merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan yang diperlukan, karena aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaannya, baik kepada publik maupun kepada lembaga dimana dia bekerja. Dengan akuntabilitas publik, setiap aparat harus dapat menyajikan informasi yang benar dan lengkap untuk menilai kinerjanya, baik yang dilakukan oleh masyarakat, instansi kerjanya, kelompok pengguna pelayanannya maupun profesinya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun dalam proses penyusunan LPP Kalurahan ini sesuai dengan tahapan-tahapan sesuai aturan yang berlaku.

Akhir kata, semoga program kerja tahunan pemerintah Kalurahan dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Akhir Tahun Anggara ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kalurahan Wunung khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Wunung, 30 Januari 2025



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- a. Tujuan Penyusunan Laporan
- b. Visi Dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan
- c. Strategi Dan Kebijakan

BAB II PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN

- a. Gambaran Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan
- b. Rencana Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- c. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

BAB III PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

- a. Gambaran Umum Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
- b. Rencana Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- c. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

BAB IV PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

- a. Gambaran Umum Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan.
- b. Rencana Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- c. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

BAB V PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- a. Gambaran Umum Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
- b. Rencana Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- c. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

BAB VI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

- a. Rincian APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024
- b. Rincian Realisasi APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024

BAB VII KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

BAB VIII PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tujuan Penyusunan Laporan

Tujuan penyusunan LPP Kalurahan adalah sebagai salah satu upaya mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kalurahan.

B. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

1. Visi Kalurahan Wunung

Visi yang ditetapkan Kalurahan Wunung Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Kalurahan Wunung Sebagai Kalurahan Pertanian Dan Kalurahan Wisata Menuju Masyarakat Makmur, Religius Dan Berbudaya”.

Visi Kalurahan Wunung dapat diuraikan dalam pengertian sebagai berikut :

- a. Pemerintahan yang jujur dan transparan adalah suatu penyelenggaraan pemerintahan yang diciptakan bersama oleh semua elemen masyarakat dengan benar, disiplin, semangat, bekerja keras, gotong royong dan keterbukaan.
- b. Masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang berpendidikan, kritis yang membangun, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan di wilayahnya.
- c. Masyarakat mandiri produktif adalah masyarakat yang inovatif mampu memenuhi kebutuhan hidup yang sejahtera.
- d. Masyarakat yang makmur sejahtera adalah masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder serta tersier.
- e. Masyarakat yang bertaqwa adalah masyarakat yang beriman kepada Tuhan YME dan senantiasa berfikir bertindak sesuai agamanya.

2. Misi Kalurahan Wunung

Misi merupakan sesuatu yang diemban atau dilaksanakan oleh Kalurahan Wunung untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai yang diharapkan.

Untuk memberikan kemudahan bagi penyelenggara pembangunan dan pemerintahan agar sesuai dan selaras dengan isi substansinya maka dirumuskan Misi Kalurahan Wunung Tahun Anggaran 2022-2027 sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
 - a) Peningkatan kapasitas perangkat Kalurahan dan lembaga Kalurahan
 - b) Kemudahan dalam pelayanan masyarakat
 - c) Meningkatkan administrasi Kalurahan dan lembaga Kalurahan
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
 - a) Pendidikan dan pelatihan
 - b) Pembinaan
 - c) Pengembangan industri pertanian
3. Meningkatkan sarana dan prasarana Kalurahan
 - a) Sumber untuk irigasi, JUT dan alat pertanian
 - b) Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) sampai tingkat RT
 - c) Ambulance Kalurahan

4. Meningkatkan pengelolaan wisata yang profesional
 - a) Penataan kelembagaan wisata
 - b) Peningkatan kapasitas pengelola
5. Menanamkan nilai - nilai religius dan budaya sesuai kearifan lokal Kalurahan
 - a) Meningkatkan kegiatan keagamaan, seni budaya
 - b) Aktraksi seni budaya

C. Strategi dan Kebijakan

1. Strategi

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan Kalurahan dirinci setiap misi dan tujuan sebagai berikut :

a. Strategi Internal

Strategi internal pencapaian program pembangunan Kalurahan meliputi:

1. Peningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Kalurahan (PAKalurahan) melalui pendayagunaan potensi dan aset-aset Kalurahan yang selama ini belum dikelola secara maksimal serta penataan retribusi administrasi pelayanan publik yang jelas, tegas, transparan, dan terjangkau.
2. Mendorong peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan yang ditujukan utamanya kepada rumah tangga sejahtera/ kaya.
3. Penataan manajemen perencanaan pembangunan melalui pemilahan target pembangunan supra Kalurahan dan infra Kalurahan. Artinya, target pembangunan yang menjadi wilayah SKPD kabupaten maupun provinsi seperti jalan kabupaten dan provinsi beserta bangunan pelengkapanya, maka leading sektornya diserahkan kepada kabupaten melalui musrenbang Kapanewon, forum SKPD maupun musrenbang kabupaten, dan seterusnya. Sedangkan sumber pembiayaan di mana Lurah menjadi penanggungjawab dalam pelaksanaanya seperti ADD, maka dialokasikan untuk membiayai target pembangunan yang menjadi tanggungjawab Kalurahan seperti jalan lingkungan Kalurahan beserta bangunan pelengkapanya.
4. Meningkatkan kesadaran kritis, rutinitas, dan daya tawar politis masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar RPJM Kalurahan yang telah disusun melalui pendekatan partisipatif ini menjadi media pemberdayaan masyarakat di mana masyarakat Kalurahan semakin diperhitungkan di hadapan para stake holder.

Misi 1 :

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, dengan tujuan-tujuan :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan Kalurahan.
2. Meningkatkan pelayanan bidang pemerintahan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas demokratisasi di Kalurahan.
4. Meningkatkan transparansi dan rasa keadilan serta ketertiban masyarakat.

Strategi untuk mencapai misi kesatu dan tujuan-tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah Kalurahan dan etos kerja birokrasi.
2. Meningkatkan kesempatan dan peran serta secara aktif pengawasan masyarakat (control public)
3. Meningkatkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan termasuk keuangan Kalurahan.
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang demokratis.
5. Meningkatkan pelayanan kualitas pelayanan publik di berbagai bidang pelayanan
6. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.

b. Strategi Eksternal

Strategi eksternal pencapaian program pembangunan Kalurahan antara lain:

1. Melakukan pengawalan terhadap kebijakan pembangunan Kalurahan yang dituangkan dalam RPJM Kalurahan pada forum musrenbang dan forum-forum SKPD.
2. Membangun kerjasama di tingkat antarKalurahan untuk mendorong pemerintah daerah melakukan reorientasi kebijakan dalam memperkuat pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat.
3. Mendorong DPRD agar pro rakyat dan membentuk peraturan perundangan daerah yang mendukung pembangunan partisipatif. Hal ini untuk memberikan pedoman dan arah bagi SKPD untuk mensinergikan dan menyelaraskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan perencanaan pembangunan melalui RPJM Kalurahan.
4. Mendorong fungsi DPRD di dapil setempat sebagai wakil rakyat dalam mengakomodasi aspirasi RPJM Kalurahan melalui hearing dan jaring asmara. Hal ini sekaligus menjadi pertanggungjawaban wakil rakyat kepada para konstituennya di daerah pemilihan sehingga bilamana anggota dewan yang bersangkutan tidak mampu memperjuangkan RPJM Kalurahan, maka masyarakat akan memberikan sanksi politis pada pemilu berikutnya.
5. Membangun kemitraan dengan pihak ketiga dalam mewujudkan capaian program. Kemitraan tersebut kerjasama dengan dunia usaha dalam bidang pertanian, atau bentuk lain dari partisipasi dunia usaha dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya.

Misi 1:

Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata, dengan tujuan-tujuan :

1. Meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas.
2. Meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian dalam arti luas.
3. Meningkatkan pemberdayaan para pelaku usaha pertanian dalam arti luas.
4. Meningkatkan penguasaan ketrampilan dan pembinaan pelaku usaha industri, perdagangan dan pariwisata.

Strategi untuk mencapai misi kesatu dan tujuan-tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketrampilan SDM petani dalam arti luas dalam upaya peningkatan produksi.
2. Meningkatkan pendampingan petani untuk menjadi mitra usaha dengan pelaku perdagangan.
3. Meningkatkan kerja sama pemerintah Kalurahan dengan investor guna pengembangan agrowisata.
4. Meningkatkan peran pasar lokal serta jejaring kemitraan serta promosi dan akses pemasaran bagi petani.
5. Meningkatkan penyediaan sarana produksi alsintan sarana irigasi melalui pompanisasi, pengembangan sumur usaha tani dan pemberdayaan Unit Air Tirto Wunung.

Misi 2:

Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian, dengan tujuan-tujuan :

1. Meningkatkan pengendalian perencanaan dan kerusakan lingkungan hidup.
2. Meningkatkan upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

Strategi untuk mencapai misi kedua dan tujuan-tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan dan sumber daya alam.
2. Mengoptimalkan peran serta masyarakat terutama organisasi masyarakat peduli lingkungan.
3. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk memacu pertumbuhan di seluruh wilayah dengan karakteristik masing-masing.
Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik, dengan tujuan-tujuan :
 1. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat.
 2. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan.
 3. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan.
 4. Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga pada masyarakat.
 5. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Strategi untuk mencapai misi keenam dan tujuan-tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan fasilitas bantuan operasional satuan pendidikan yang ada di Kalurahan.
2. Meningkatkan fasilitas bantuan operasional di bidang pendidikan, pembinaan pemuda dan olahraga.
3. Peningkatan fasilitas kajian buku/kitab keagamaan.

Misi 3 :

Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian Kalurahan, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya, dengan tujuan :

1. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana perekonomian Kalurahan.

2. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan pelayanan kesehatan Kalurahan.
3. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan.
4. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana bidang pemerintahan.

Strategi untuk mencapai misi keempat dan tujuan-tujuan diatas adalah :

1. Meningkatkan pembangunan sarpras ekonomi.
2. Meningkatkan pembangunan sarpras pertanian dalam artitluas.
3. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarpras pendidikan.
4. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarpras di bidang pemerintahan.

Misi 4 :

Peningkatan dan mengembangkan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan bertujuan :

1. Meningkatkan pendapatan asli Kalurahan dan masyarakat pada umumnya, perluasan kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan-kegiatan industri penunjang dan industri sampingan lainnya.
2. Memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha.
3. Membuka lapangan pekerjaan baru terutama bagi masyarakat setempat.
4. Mendorong pembangunan Kalurahan
5. Memperkokoh persatuan dan kesatuan masyarakat dengan bergotong royong
6. Meningkatkan kegiatan ekonomi dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat Kalurahan
7. Memperkenalkan kekayaan alam dan budaya bangsa

Strategi untuk mencapai misi ke tiga dalam mengembangkan pariwisata ini, yaitu:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana obyek wisata agar tidak kalah dengan wisata lainnya
2. Adanya pembenahan-pembenahan objek-objek wisata (wisata alam, sosial dan wisata budaya)
3. Meningkatkan promosi wisata
4. Peningkatan kemampuan SDM dalam kepeemanduan dan manajemen.

Misi 5 :

Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang, dengan tujuan :

1. Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat.
2. Meningkatkan optimalisasi kesehatan masyarakat.

Strategi mencapai misi kelima dan tujuan-tujuan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi penduduk miskin.
2. Meningkatkan usaha promosi dan pencegahan penyakit.
3. Meningkatkan peran serta pemberdayaan masyarakat.

2. Kebijakan

Arah kebijakan pengembangan pembangunan Kalurahan Wunung secara umum adalah meningkatkan kemandirian masyarakat dan Kalurahan, serta

mewujudkan ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi sesuai dengan amanat Undang-Undang No.6/2014 tentang Kalurahan. Dengan mengedepankan pada sektor Pertanian dan Pariwisata serta penguatan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUM Kalurahan).

Dalam rangka percepatan pembangunan Kalurahan maka Arah kebijakan pembangunan Kalurahan Wunung adalah :

1. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan dan Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang Baik :
 - a. Pengelolaan kebutuhan operasional pemerintah Kalurahan ;
 - b. Pembuatan Peraturan Kalurahan dan Peraturan Lurah untuk menentukan arah kebijakan Kalurahan ;
 - c. Pengembangan data dan informasi Kalurahan yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan Kalurahan;
 - d. kerjasama antar Kalurahan.
2. Peningkatan pelaksanaan pembangunan Kalurahan antara lain:
 - a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Kalurahan antara lain: jalan dan lingkungan pemukiman, jalan Kalurahan, infrastruktur Kalurahan lainnya.
 - b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain: sarana air bersih skala Kalurahan, sanitasi, posyandu, dan sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Kalurahan.
 - c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: taman bacaan masyarakat; pendidikan anak usia dini; kegiatan belajar masyarakat; pengembangan dan pembinaan sanggar seni; sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Kalurahan.
 - d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 - Penguatan permodalan BUM Kalurahan;
 - Pembangunan Sumur Bor untuk Irigasi pertanian
 - pembibitan tanaman pangan;
 - lumbung Kalurahan;
 - pembukaan lahan pertanian;
 - pembangunan tanah kas Kalurahan untuk sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Kalurahan.
 - e. Pelestarian lingkungan hidup antara seperti perlindungan sumber air bersih dan penyediaan tempat pembuangan sampah.
3. Peningkatan Pembinaan Kemasyarakatan antara lain :
 - a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. pembinaan pemahaman umat beragama;
 - d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - e. pembinaan kelompok tani;
 - f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
 - g. dan kegiatan lain sesuai kondisi Kalurahan.
4. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
 - a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;

- b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. Peningkatan kapasitas Lurah, Perangkat Kalurahan, BAMUSKAL dan Lembaga Kalurahan;
 - d. peningkatan kapasitas masyarakat (kader pemberdayaan masyarakat Kalurahan; kelompok usaha ekonomi produktif; kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok pemuda; dan kelompok lain sesuai kondisi Kalurahan).
- b. Arah Kebijakan Keuangan Kalurahan

Berdasar Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kalurahan tersebut, sedangkan pengelolaan keuangan Kalurahan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Kalurahan.

Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi misi dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKalurahan) dapat tercapai atau terealisasi maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, konsisten, dan signifikan.

Penyusunan RPJMKalurahan akan menghasilkan rencana pembangunan yang telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dari sisi kemampuan penganggarnya. Kemampuan anggaran Kalurahan diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran Kalurahan, yang akan berlaku selama lima tahun kedepan. Mekanisme dan substansi penetapan perencanaan dikaitkan dengan penganggaran ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan Kalurahan dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan Kalurahan.

Dalam penyusunan bagian gambaran pengelolaan keuangan Kalurahan dan kerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, sebab akan sangat berdampak pada penciptaan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi dan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan Kalurahan yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah Kalurahan menjadi lebih efisien, efektif dan akuntabel dalam merumuskan kebijakannya.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian Kalurahan, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar Kalurahan yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang maksimal atas potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan; untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian Kalurahan.

Pendapatan Kalurahan Wunung meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kalurahan yang merupakan hak Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kalurahan. Pengelolaan pendapatan asli Kalurahan bertujuan untuk mengoptimalkan keleluasaan

Kalurahan dalam menggali pendanaan otonomi Kalurahan sebagai wujud tanggungjawab daerah RPJM Kalurahan - Kalurahan Wunung Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan desentralisasi.

Belanja Kalurahan, meliputi semua pengeluaran dari rekening Kalurahan yang merupakan kewajiban Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kalurahan.

Pembiayaan Kalurahan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan Kalurahan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran(SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Kalurahan dan penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran utang.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan Kalurahan adalah Lurah, karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kalurahan yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh pelaksana teknis Pengelolaan keuangan Kalurahan yang diangkat dari perangkat Kalurahan yang ditunjuk.

Kondisi kemampuan atau kapasitas keuangan Pemerintah Kalurahan Wunung sangat menentukan dalam upaya menghasilkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kalurahan Wunung. Jumlah pendapatan Kalurahan Wunung tahun 2021 adalah sebesar Rp. 2.057.311.960,- belanja Kalurahan Rp.197.7738.571,40- dengan Silpa Tahun Sebelumnya adalah Sebesar Rp. 92.336.646,-. Dari data tersebut menunjukkan kemampuan Kalurahan untuk merealisasikan Anggaran Kalurahan sudah 91% hal itu mengingat untuk pembiayaan yang telah terprogram tidak dapat direalisasikan karena masih belum siap kondisi di lapangan serta Tahun Anggaran yang sudah hampir habis, sehingga perlu untuk dievaluasi terlebih dahulu agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Tetapi kalau untuk bidang pembangunan sebenarnya anggaran sangat terbatas, sehingga banyak sekali program yang tidak dapat dianggarkan dalam APBKal.

a. Arah pengelolaan pendapatan.

1. Kondisi Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Kalurahan dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan Kalurahan, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan Kalurahan meliputi pendapatan asli Kalurahan (PAD), pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain.

Selama 4 (empat) tahun terakhir pendapatan Kalurahan Wunung selalu mengalami peningkatan, dimana pendapatan Kalurahan meningkat setiap tahunnya pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.537.873.884,- - Tahun 2019 sebesar Rp. 1.631.508.204,- , Tahun 2020 sebesar Rp, 1.565.604.093,- dan Tahun 2021 Rp. Rp. 2.057.311.960,-

Anggaran diupayakan dapat memenuhi prinsip keseimbangan finansial, yaitu antara pendapatan dengan belanja terdapat keseimbangan (tidak terjadi RPJM

Kalurahan - Kalurahan Wunung Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul defisit maupun surplus), namun demikian dalam beberapa kondisi yang cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan apabila terjadi defisit atau pun surplus hal tersebut dapat ditolerir.

Dalam hal APBDes terjadi surplus (pendapatan lebih besar daripada belanja, sehingga terdapat surplus APBDes), maka kebijakan yang diambil adalah sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Apabila APBDes mengalami defisit (pendapatan lebih kecil daripada belanja, sehingga terdapat defisit APBDes), maka kebijakan yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut :

1. Memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu.
2. Melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja berdasar kriteria urutan prioritas urgensi dan pembiayaannya.

Kebijakan Pendapatan Kalurahan Pendapatan asli Kalurahan Wunung sebagian besar diperoleh dari hasil tanah kas Kalurahan dan hasil dari BUMKalurahan. Untuk tanah kas Kalurahan yang pada umumnya berupa lahan tegalan dan kios Kalurahan. Begitu juga hasil dari BUMKalurahan dimana hasilnya disesuaikan dengan keuntungan bersih setiap bulannya.

Berdasarkan pada realisasi pendapatan Kalurahan selama 2 tahun terakhir maka pendapatan Kalurahan Wunung pada tahun - diperkirakan akan tampak seperti dalam tabel berikut.

Tabel V.2.
Proyeksi Pendapatan Kalurahan Wunung

NO	URAIAN	TAHUN					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Pendapatan Asli Kalurahan	16.350.000,00	26.350.000,00	46.350.000,00	76.350.000,00	116.350.000,00	166.350.000,00
2	Pendapatan Transfer	2.390.945.500,00	2.890.945.500,00	3.390.945.500,00	3.890.945.500,00	4.390.945.500,00	4.890.945.500,00
3	Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00	16.000.000,00	26.000.000,00	36.000.000,00	46.000.000,00	56.000.000,00
JUMLAH		2.413.295.500,00	2.933.295.500,00	3.463.295.500,00	4.003.295.500,00	4.553.295.500,00	5.113.295.500,00

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan Kalurahan diarahkan pada usaha optimalisasi potensi PAD dan penerimaan Kalurahan lainnya. Pendapatan asli Kalurahan Wunung tahun 2022-2027 diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 7 % per tahun.

Proyeksi pendapatan Kalurahan ini termasuk Pendapatan Asli Kalurahan bersifat indikatif atau sementara sehingga masih sangat mungkin untuk mengalami RPJM Kalurahan - Kalurahan Wunung Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul perubahan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebijakan yang ada.

Kebijakan pengembangan pendapatan Kalurahan yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2022-2027) diarahkan pada :

- a. Optimalisasi Pengembangan usaha BUMKalurahan Bangun Kencana dengan prinsip nondiskriminasi dan melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan didukung perbaikan manajemen berbasis profesionalisme SDM.
- b. Optimalisasi pemanfaatan aset-aset Kalurahan yang potensial, penerapan sistem incentive and disincentive sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik.
- c. Peningkatan koordinasi dan konsultasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan ADD dan Dana Kalurahan.

b. Arah Pengelolaan Belanja Kalurahan

b.1. Kondisi Belanja Kalurahan

Belanja Kalurahan meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum Kalurahan yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban Kalurahan dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kalurahan. Belanja Kalurahan dirinci menurut urusan pemerintahan Kalurahan, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja Kalurahan dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kalurahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja Kalurahan harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional, baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas sumber-sumber pendapatan Kalurahan oleh Pemerintah Kalurahan. Hal ini dikandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran Kalurahan. Belanja Kalurahan diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, disamping itu belanja Kalurahan harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan Kalurahan.

Selama 3 (tiga) tahun terakhir belanja Kalurahan Wunung cenderung fluktuatif seiring keadaan adanya pandemi dan kondisi masyarakat yang belum stabil, dimana belanja Kalurahan pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.747.334.604,- pada Tahun 2020 sebesar Rp. 1.565.754.096,- dan pada Tahun 2021 sebesar Rp. 1.977.738.571,40,-.

b.2. Kebijakan Belanja Kalurahan

Belanja Kalurahan dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Kalurahan yang terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Adapun klasifikasi Belanja Kalurahan terdiri atas kelompok : Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Belanja bidang Pembangunan Kalurahan, Belanja bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, Belanja bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan MenKalurahank Kalurahan

Dalam 6 (enam) tahun kedepan (tahun 2022 s.d 2027) estimasi pengelolaan belanja Kalurahan sebagai berikut :

Tabel V.3.
Proyeksi Belanja Kalurahan Wunung 2022-2027

NO	URAIAN	TAHUN					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	780.276.800,00	800.276.800,00	820.276.800,00	840.276.800,00	860.276.800,00	880.276.800,00
2	Bidang Pembangunan Kalurahan	1.096.292.366,00	1.800.000.000,00	2.261.893.700,00	2.731.668.700,00	3.221.443.700,00	3.721.218.700,00
3	Bidang Kesejahteraan Masyarakat Kalurahan	5.225.000,00	10.450.000,00	26.125.000,00	31.350.000,00	36.575.000,00	41.800.000,00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	105.733.200,00	150.000.000,00	175.000.000,00	200.000.000,00	225.000.000,00	250.000.000,00
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan MenKalurahank Kalurahan	425.768.134,00	172.568.700,00	180.000.000,00	200.000.000,00	210.000.000,00	220.000.000,00
	JUMLAH	2.413.295.500,00	2.933.295.500,00	3.463.295.500,00	4.003.295.500,00	4.553.295.500,00	5.113.295.500,00

Formulasi kebijakan belanja Kalurahan diarahkan pada efisiensi dan efektifitas skala prioritas dan program strategis pembangunan Kalurahan Wunung, dimana pada level kebijakan anggaran belanja Kalurahan dicerminkan pada proyeksi belanja Kalurahan yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan.

Kebijakan pengembangan belanja Kalurahan yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2022-2027) diarahkan pada:

- a. Optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. RPJM Kalurahan - Kalurahan Wunung Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul
- b. Peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan Kalurahan, melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) perangkat Kalurahan dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani.
- c. Penetapan dan penerapan tolok ukur (indikator) dan target capaian pada setiap program/kegiatan pembangunan Kalurahan sesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja.
- d. Peningkatan akses informasi tentang belanja Kalurahan oleh masyarakat; peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan, yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil.
- e. Peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaran belanja Kalurahan sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Kalurahan dan prioritas kebutuhan Kalurahan serta pertimbangan kinerja.

c. Arah pengelolaan pembiayaan kalurahan

c.1. Kondisi Pembiayaan Kalurahan

Pembiayaan Kalurahan meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan Kalurahan, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan Kalurahan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

c.2 Arah Pengelolaan Pembiayaan

Pengelolaan pembiayaan Kalurahan diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBDes. Struktur pembiayaan Kalurahan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila performance budgeting memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan Kalurahan yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Kalurahan yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

BAB II
PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN

A. Gambaran Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

Penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan merupakan kewenangan Kalurahan. Pemerintahan Kalurahan memiliki kekuasaan untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dalam konstruksi Permendes Nomor 1 Tahun 2015, penyelenggaraan pemerintahan kalurahan merupakan kewenangan lokal skala Kalurahan. Dengan demikian Kalurahan dapat mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya.

Urusan berdasarkan hal asal-usul Kalurahan adalah kewenangan dan kewajiban pemerintah Kalurahan untuk mengatur Kalurahannya berdasarkan kegiatan-kegiatan, aturan-aturan dan kebiasaan yang telah ada sejak dulu.

Berdasarkan Peraturan Kalurahan Wunung Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang menyangkut dengan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah	
			2023	2024
1	2	3	4	5
1.	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Kalurahan	8	8
		b. Peraturan Bersama Lurah	1	0
		c. Peraturan Lurah	10	9
		d. Keputusan Lurah	30	48
2.	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk:		
		1) Laki-laki	1.836	1.947
		2) Perempuan	1.819	1.969
		3) Jumlah Kepala Keluarga	1.173	1.240
		4) Jumlah Anggota Keluarga	2.482	2.676
		5) Jumlah Jiwa	3.655	3.916
		b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:		
		1) Pendidikan Umum	374	615
		2) Pendidikan Khusus	6	12
		c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian:		
1) PNS	37	30		
2) TNI	0	2		
3) Swasta	215	256		
3.	Pertanahan.	a. Status Tanah:		
		1) Sertifikat Hak Milik	2.925	3.094
		2) Sertifikat Hak Guna Usaha	0	0
		3) Sertifikat Hak Pakai	20	20
		b. Luas Tanah:		

		1) Bersertifikat	3.506.400	5.129.866
		2) Belum Bersertifikat	614.400	5.320.134
		3) Tanah Kas Kalurahan	81.000	43.379
		c. Peruntukan:		
		1) Jalan	2	2,5
		2) Tanah Ladang	3,5	3
		3) Bangunan Umum	0,5	0,5
		4) Perumahan	3	3
		5) Ruang Fasilitas Umum	1	1
		d. Tanah yang Belum Dikelola		
		1) Hutan	2,3	2,3
		2) Rawa-rawa	0	0
4.	Manajemen Pemerintahan.	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Kalurahan		
		1) PNS	0	0
		2) Non PNS	17	17
		b. Jumlah Anggota Bamuskal	9	9
		c. Musyawarah Kalurahan	2	4
		d. Musrengbangkal	1	1
		e. Musyawarah Bamuskal	6	6
5.	Ketentraman dan Ketertiban.	a. Pembinaan Linmas		
		1) Jumlah Anggota	35	35
		2) Alat Pemadam kebakaran	0	0
		3) Jumlah Hansip Terlatih	35	35
		b. Ketentraman dan Ketertiban:		
		1) Jumlah Kejadian kriminal	0	0
		2) Jumlah Bencana Alam	0	0
		3) Jumlah Operasi Penertiban	0	0
		4) Jumlah Pos Keamanan	30	30
		5) Jumlah Kecelakaan Remaja	2	4
6.	Pembinaan lembaga kemasyarakatan.	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan:		
		1) RT/RW - Ada/Tidak	Ada	Ada
		2) PKK - Ada/Tidak	Ada	Ada
		3) Karang Taruna - Ada/Tidak	Ada	Ada
		4) Pos Pelayanan Terpadu - Ada/Tidak	Ada	Ada
		5) LPM - Ada/Tidak	Ada	Ada
		b. Lembaga kemasy. membantu Pem. Kal. dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pemb., pembinaan kemasy. dan pemberdayaan masy. - Ya/Tidak	Ya	YA
		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pem. Kal. - Ya/Tidak	YA	Ya
		d. Lembaga Kemasyarakatan diikuti sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program PemDa. - Ya/Tidak	YA	Ya
		e. Lembaga Adat - Ada Tidak	Tidak	Tidak
		f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Kalurahan terpisah dengan lembaga kemasyarakatan - Ya/Tidak	Tidak	Tidak

- B. Rencana Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- 1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah
 - 2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong
 - 3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong
 - 4 Penyediaan Operasional Pemerintah Kal. (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
 - 5 Penyediaan Tunjangan Bamuskal
 - 6 Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
 - 7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 - 8 Lain-lain Operasional Pemerintah Kalurahan 3 % dari DDS
 - 9 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
 - 10 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)
 - 12 Pengadaan peralatan kerja
 - 13 Pengadaan mebeleur
 - 14 Penyediaan jasa perbaikan/servis mebeleur
 - 15 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - 16 Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
 - 17 Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja
 - 18 Pengadaan mesin/kartu absensi
 - 19 Penyediaan jasa jaminan barang milik desa
 - 20 Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
 - 21 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
 - 22 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)
 - 23 Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
 - 24 Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
 - 25 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kal. secara Partisipatif
 - 26 Penyusunan monografi
 - 27 Pendataan keluarga/rumah tangga miskin
 - 28 Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan
 - 29 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
 - 30 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
 - 31 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
 - 32 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
 - 33 Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
 - 34 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
 - 35 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
 - 36 Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - 37 Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
 - 38 Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes
 39. Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran

40. Pengisian perangkat desa
41. Penghargaan purna tugas bagi aparatur pemerintahan desa
42. Penyusunan perencanaan pemanfaatan tata ruang desa
43. Pengadaan pakaian dinas/seragam
44. Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan
45. Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan
46. Sertifikasi Tanah Kas Desa
47. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
48. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
49. Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB

C. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
5. Penyediaan Tunjangan BPD
6. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, dll)
7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
8. lain-lain sub bidang siltap dan operasional pemerintah desa
9. Pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa
10. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor desa
11. Pengadaan peralatan kerja
12. Pengadaan mebelair
13. Penyediaan jasa perbaikan/service kendaraan dinas
14. Penyediaan jasa perbaikan/service peralatan kerja
15. Penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil desa
16. Penyusunan monografi desa
17. pendataan keluarga miskin
18. Penyelenggaraan Musy. Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
19. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
20. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
21. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
22. Penyusunan Lap. Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
23. Pengembangan Sistem Informasi Desa

BAB III

PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

A. Gambaran Umum Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kalurahan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kalurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kalurahan.

Pemerintah Kalurahan menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan dan Pembangunan Kalurahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan seluruh masyarakat Kalurahan dengan semangat gotong royong.

Berdasarkan Peraturan Kalurahan Wunung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang RPJMKal dan Peraturan Kalurahan Wunung Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024, dalam bidang pelaksanaan pembangunan kalurahan di Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kalurahan Wunung, telah merencanakan sekaligus melaksanakan beberapa kegiatan pembangunan diantaranya, meliputi :

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak	
			2023	2024
1	2	3	4	5
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Kalurahan (Km)	33	33
		b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	8	8
		c. Jalan Provinsi (Km)	0	0
		d. Jalan Negara (Km)	0	0
		e. Jembatan (Buah)	0	0
		f. Kantor Lurah (Ada/Tidak)	Ada	Ada
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan. Pendidikan Umum		
		1). Kelompok Bermain (Jumlah)	3	3
		2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah)	3	3
		3). Sekolah Dasar (Jumlah)	3	3
		4). Sekolah Menengah(Jumlah)	0	0
		5). Akademi (Jumlah)	0	0
		6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)	0	0
		b. Tempat Pendidikan Khusus	0	0
		1). Pendidikan Pesantren (Jumlah)	0	0
		2). Madrasah (Jumlah)	0	0
		3). Sekolah Luar Biasa(Jumlah)	0	0
4). Balai Latihan Kerja (Jumlah)	0	0		
5). Kursus-Kursus (Jumlah)	0	1		
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah)	0	0

		b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah)	0	0
		c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah)	0	0
		d. Rumah sakit Mata (Jumlah)	0	0
		e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah)	0	0
		f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah)	0	0
		g. Rumah Bidan (Jumlah)	0	0
		h. Puskesmas (Jumlah)	1	1
		i. Apotik (Jumlah)	0	0
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a. Sarana Olahraga: 1). Lapangan Umum (Jumlah) 2). Lapangan Khusus (Jumlah)	2 4	2 4
		b. Sarana Kesenian/Kebudayaan: 1). Gelanggang Remaja (Jumlah) 2). Gedung Kesenian (Jumlah) 3). Gedung Teater (Jumlah) 4). Gedung Bioskop (Jumlah)	0 0 1 0	0 0 1 0
		c. Sarana Sosial: 1). Panti Asuhan (Jumlah) 2). Panti Pijat Tunanerta (Jumlah) 3). Panti Wordo (Jumlah) 4). Panti Jompo (Jumlah)	0 0 0 0	0 0 0 0
		d. Sarana Komunikasi: 1). Radio Komunitas (Jumlah) 2). Papan Pengumuman (Jumlah)	0 0	0 0
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah)	0	0
		b. Industri Besar (Jumlah)	1	1
		c. Industri Sedang (Jumlah)	10	10
		d. Industri Rumah Tangga (Jumlah)		
		e. Tempat Rekreasi (Jumlah)	2	2
		f. Hotel (Jumlah)	1	1
		g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah)	1	1
		h. Saluran Irigasi (Jumlah)	0	0

B. Rencana Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

1. Penyelengg. PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ Milik Kal.(Honor, Pakaian dll)
2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
3. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
4. Pemb. sarpras Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa
5. Pembangunan/rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa
6. Pemeliharaan gedung PAUD/TK Milik Desa
7. Penyelengg.Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
8. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
9. Penyuluhan Bid. Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)

10. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
11. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Kalurahan
12. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
13. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
14. Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
15. Pemb./Rehab./Peningk./Pengadaan sarpras Posyandu/Polindes/PKD **
16. Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)
17. Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
18. Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD
19. Penyusunan data mengenai kesehatan masyarakat
20. Pembinaan dan pengembangan Kampung KB
21. Insentif kader kesehatan/KB
22. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan
23. Pemeliharaan Jalan Kalurahan
24. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
25. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
26. Pemeliharaan Jembatan Kalurahan
27. Pemel. Prasarana Jalan Kal. (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)
28. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
29. Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
30. Pemeliharaan Embung Milik Desa
31. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
32. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)
33. Pemb./Rehab./Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingk. Permukiman **)
34. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)
35. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)
36. Pemb./Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
37. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Kal./Balai Kemasyarakatan **)
38. Pemb. Pemakaman Milik Desa/Situs Bersej. Milik Kal./Petilasan
39. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Kal. **)
40. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kal.
41. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Kal. **)
42. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Kal. **)
43. Pembangunan/rehabilitasi bangunan penampung air komunal
44. Pemeliharaan bangunan penampung air komunal
45. Penyediaan sarana prasarana pemakaman milik Kal.
46. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
47. Dukungan Pelaks. Prog. Pemb./Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
48. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
49. Pemel. Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penamp. Air, Sumur Bor dll)
50. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)
51. Pemel. Sanitasi Pemukiman (Gorong², Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)
52. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll
53. Pemel. Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)
54. Pemel. Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
55. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
56. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)

57. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)
58. Pemb./Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)
59. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)
60. Pemb./Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)
61. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)
62. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)
63. Pemb./Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)
64. Penyediaan dan pengelolaan air bersih skala desa
65. Pemberian stimulan jamban sehat
66. Pengelolaan sampah desa/permukiman
67. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
68. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah
69. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
70. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)
71. Pembinaan kelompok pelestari lingkungan hidup di desa
72. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
73. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
74. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
75. Pemb. dan Pengel. Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Kal.
76. Pengadaan sarana prasarana penerangan jalan desa/lingkungan permukiman
77. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
78. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
79. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
80. Pemb./Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)
81. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
82. Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata
83. Peningkatan Kapasitas pengelola wisata milik desa
84. Pembangunan/Rehabilitasi Rest Area Milik Desa
85. Lain-Lain Legiatan Sub Bidang Pariwisata

C. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

1. Dukungan penyelenggaraan PAUD
2. Rehabilitasi gedung PAUD
3. Penyelenggaraan Pos Kesehatan desa/polindes milik desa
4. Penyelenggaraan Posyandu
5. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
6. Pengasuhan bersama/Bina Keluarga Balita (BKB)
7. Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
8. Pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman
9. Pemeliharaan prasarana jalan desa (Gorong-gorong, selokan, dll)
10. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan permukiman
11. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
12. Pelaksanaan Rehab rumah

BAB IV

PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

- A. Gambaran Umum Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan.
 Berdasarkan Peraturan Kalurahan Wunung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang RPJMDesa dan Peraturan Kalurahan 6 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024, dalam bidang pembinaan kemasyarakatan di tahun anggaran 2024 Pemerintah Kalurahan Wunung, telah melaksanakan beberapa kegiatan pembinaan diantaranya, meliputi :

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak Ada			
			2023	2024		
1	2	3	4			
1.	Sosialisasi Produk Hukum Kalurahan	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah terkait Kalurahan: 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berapa Kali)	1	1		
		2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaks. UU No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)	1	1		
		3) Peraturan Menteri mengenai Kalurahan (Berapa Kali)	1	1		
		b. Sosialisasi Kebijakan Pem. Daerah 1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Kalurahan (Berapa Kali)	1	1		
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati Tentang Kalurahan (Berapa Kali)	1	1		
		c. Sosialisasi Kebijakan Pem. Kalurahan 1) Sosialisasi Peraturan Kalurahan (Berapa kali)	1	1		
		2) Sosialisasi Peraturan Lurah	1	1		
		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Lurah (Berapa Kali)	1	1		
		2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	1	1
				b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Kalurahan (Ada/Tidak)	Ya	Ya
c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)	Ya			Ya		
d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)	Ya			Ya		
e. Masy. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Kalurahan (Ya/Tidak)	Ya			Ya		
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)	1	1		

		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)	1	1
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali)	1	1
		d. Sosialisasi mengenai lingk. hidup (Berapa kali)	1	1
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)	1	1
		f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	1	1
4.	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	2	1
		b. Majelis gereja (Jumlah)	0	0
		c. Majelis Budha (Jumlah)	0	0
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	0	0
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	1	1
		f. Remaja Gereja (jumlah)	0	0
		g. Remaja Budha (Jumlah)	0	0
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	0	0
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	0	0
		b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)	0	0

B. Rencana Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

1. Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
2. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan oleh Pempdes
3. Koord. Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlind. Masy. Skala Lokal Desa
4. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
5. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
6. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
7. Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana
8. Pengadaan peralatan pendukung keamanan dan ketertiban masyarakat
9. Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana
10. Pembinaan Jaga Warga
11. Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)
12. Pengadaan seragam Satlinmas
13. Lain-lain Keg.Sub.Bid. Ketentramn, Ketertiban Umum dan Perlind. Masy.
14. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
15. Rehabilitasi Sarpras Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **)
16. Pemberian stimulan kegiatan keagamaan
17. Pengembangan kehidupan sosial keagamaan
18. Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa
19. Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya
20. Pelaksanaan sunatan massal
21. Pembinaan lembaga desa pelestari adat
22. Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya
23. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

24. Pemb./Rehab./Peningk. Sarpras Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
25. Pelaksanaan peringatan hari besar nasional
26. Pembangunan/rehabilitasi Gedung Serbaguna/Pertemuan milik desa
27. Operasional Karang Taruna
28. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
29. Pembinaan Lembaga Adat
30. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
31. Pembinaan PKK
32. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
33. Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa
34. Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat
35. Opt. peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)
36. Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong
37. Pembinaan RT/RW
38. Operasional LPMD dan/atau LPMD
39. Operasional PKK
40. Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

C. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

1. Lain-lain sub bidang ketentraman, ketertiban masyarakat
2. Pelaksanaan hari besar nasional
3. Operasional Karangtaruna
4. Opt. peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)
5. Operasional LKMD/LPM/LPMKal
6. Operasional PKK
7. Lain-lain sub bidang kelembagaan masyarakat

BAB V

PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Gambaran Umum Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

Berdasarkan Peraturan Kalurahan Wunung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang RPJMDesa dan Peraturan Kalurahan Wunung Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024, Pemerintah Kalurahan Wunung telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:

No.	Sub Bidang	Kegiatan	2023	2024
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)	1	1
		b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	1	1
		c. Bidang Politik (Berapa Kali)	1	1
		d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali)	1	1
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)	1	1
		b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)	1	1
		c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali)	1	1
		d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali)	1	1
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)	1	1
		b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	1	1

B. Rencana Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

1. Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kal.
2. Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kal.
3. Pembangunan/Rehab./Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kal.
4. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
5. Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)
6. Pembinaan kelompok perikanan darat
7. Pemeliharaan tempat pelelangan ikan milik Kal.
8. Pembangunan/rehabilitasi tempat pelelangan ikan milik Kal.
9. Pelatihan dan Pengembangan pakan ikan alternatif
10. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
11. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
12. Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
13. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
14. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
15. Pelatihan/Bimtek Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
16. Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana

17. Pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi tersier/ sederhana
 18. Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan
 19. Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan
 20. Pembangunan/rehabilitasi lumbung desa
 21. Pemeliharaan lumbung desa
 22. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 23. Pelatihan dan pengembangan pupuk organik
 24. Pelatihan dan Pengembangan pakan ternak organik/alternatif
 25. Peningkatan Kapasitas Lurah
 26. Peningkatan Kapasitas Pamong
 27. Peningkatan Kapasitas Bamuskal
 28. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kal.
 29. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 30. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
 31. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
 32. Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)
 33. Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)
 34. Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Kal.
 35. Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak
 36. Pembinaan ketahanan keluarga
 37. Pembinaan dan pemberdayaan kelompok rentan
 38. Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja
 39. Sosialisasi pencegahan perdagangan manusia (human trafficking)
 40. Sos. Pencegahan dan penanganan KDRT dan perlindungan anak
 41. Pembinaan pola pengasuhan dan tumbuh kembang anak
 42. Lain-lain Keg. SubBid. Pemberdayaan Perempuan, Perlind. Anak dan Keluarga
 43. Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
 44. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
 45. Pengadaan Tek. Tepat Guna Untuk Pengemb. Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
 46. Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)
 47. Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)
 48. Pelatihan Pengelolaan BUM Kal. (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
 49. Pembangunan Gedung Kantor BUM Kal.
 50. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
 51. Pemeliharaan Pasar Kal./Kios Milik Kal.
 52. Pembangunan/Rehab Pasar Kal./Kios Milik Kal.
 53. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Kal.
 54. Pembentukan/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
 55. Pembinaan pedagang di lingkungan pasar desa
 56. Pengelolaan pasar desa
 57. Pembinaan/pelatihan pengelolaan pasar desa
 58. Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
- C. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
1. Peningkatan produksi tanaman pangan

BAB VI

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

A. Rincian APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan Peraturan Kalurahan Wunung Nomor 7 Tahun 2024, tentang Perubahan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024/Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024, secara umum APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024 adalah terdiri dari :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.	2.062.427.900,00
2. Belanja Kalurahan:		
a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;	Rp.	940.700.541,00
b) Bidang Pembangunan;	Rp.	966.506.697,00
c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;	Rp.	34.524.000,00
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;	Rp.	71.150.000,00
e) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Kalurahan;	Rp.	89.474.503,00
f) Jumlah Belanja	Rp.	2.102.355.741,00
g) Surplus/Defisit.	Rp.	(39.927.841,00)
3. Pembiayaan Kalurahan :		
a) Penerimaan Pembiayaan;	Rp.	Rp39.927.841,00
b) Pengeluaran Pembiayaan;	Rp.	0,00
c) Selisih Pembiayaan;	Rp.	Rp39.927.841,00

Rincian APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

B. Rincian Realisasi APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan Peraturan Kalurahan Wunung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024, secara umum realisasi APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.	2.052.839.370,00
2. Belanja Kalurahan:		
a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;	Rp.	891.654.947,00
b) Bidang Pembangunan;	Rp.	959.905.200,00
c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;	Rp.	23.199.000,00
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;	Rp.	71.150.000,00
e) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Kalurahan;	Rp.	80.450.000,00
f) Jumlah Belanja	Rp.	2.026.359.147,00
g) Surplus/Defisit.	Rp.	26.480.223,00
3. Pembiayaan Kalurahan :		
a) Penerimaan Pembiayaan;	Rp.	39.927.841,00
b) Pengeluaran Pembiayaan;	Rp.	0,00
c) Selisih Pembiayaan;	Rp.	39.927.841,00

Rincian Realisasi APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

BAB VII

KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	SOLUSI/ UPAYA YANG DITEMPUH
1.	BIDANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran PBB tepat waktu 2. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas aparatur kalurahan yang kurang maksimal 2. Partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak tidak serempak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan secara berkelanjutan 2. Stimulan lunas PBB 3. Penggunaan mobil pajak keliling
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan angka stunting 2. Pembangunan jalan dan sarana prasarana jalan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya sarana penerangan jalan desa 2. Belum berkembangnya destinasi wisata 	Usulan dalam musrenbang kapanewon
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan turnamen olah raga dengan aman. 2. Status Desa Rintisan Budaya 	Masih terbatasnya sarana prasarana penanggulangan bencana	Penganggaran belanja sarana prasarana penanggulangan bencana dalam APBKal
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan fasilitas Taman Kuliner 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemarau panjang 2. Pengelolaan BUMKal belum optimal 	Optimalisasi BUMKal
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyaluran BLT Dana Desa 		

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024 yang dapat kami sampaikan, meskipun belum mencapai keseluruhan harapan, namun perlu kami syukuri karena dalam perjalanan selama ini kami tetap dapat melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Mudah-mudahan penyampaian LPPKal ini menjadi langkah strategis kami untuk dapat meningkatkan kinerja dan pengabdian guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Wunung yang kami cintai bersama sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Kami sadari bahwa penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat selama ini masih ada beberapa yang belum dapat terlaksana dengan optimal. Untuk itu kami mohon dukungan dan masukan guna kemajuan pembangunan di Kalurahan Wunung khususnya.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas dukungan, bantuan dan peran serta yang telah mencurahkan perhatian tenaga dan pemikirannya dalam mensukseskan berbagai program kegiatan yang telah kami lakukan selama ini.

Kami berharap apa yang telah kami perbuat dapat memberi arti dan manfaat bagi masyarakat Kalurahan Wunung. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan lahir dan batin serta senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kami untuk terus membangun Kalurahan Wunung yang kami cinta ini semakin maju, mandiri makmur dan sejahtera, sehingga dapat memberikan sedikit sumbangsih bagi kemajuan Kabupaten Gunungkidul. Amin.

Wunung, 30 Januari 2025
Lurah Wunung

SUDARTO

Lampiran I. Format Rincian APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KET.	
1				PENDAPATAN KALURAHAN	2.062.427.900,00		
1	1			Pendapatan Asli Kalurahan (PAKalurahan)	28.685.000,00		
1	1	1		Hasil Usaha			
1	1	1	1	Bagian laba bersih BUMKalurahan			
1	1	2		Hasil Pengelolaan Aset Kalurahan			
1	1	2	1	Pengelolaan tanah milik Kalurahan			
1	1	2	2	Pasar Kalurahan	10.600.000,00		
1	1	2	3	Bangunan milik Kalurahan			
				- Hasil menyewakan balai Kalurahan	2.000.000,00		
				- Hasil menyewakan ruang kantor Kalurahan			
				- Hasil menyewakan kios Kalurahan	4.500.000,00		
				- Hasil menyewakan gedung pertemuan			
				- Hasil menyewakan balai/panggung budaya			
1	1	2	4	Obyek rekreasi yang dikelola Kalurahan			
1	1	2	5	Pemandian umum yang dikelola Kalurahan			
1	1	2	6	Tambatan perahu			
1	1	2	7	Jaringan irigasi Kalurahan			
1	1	2	8	Lain-lain kekayaan milik Kalurahan			
1	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
1	1	3	1	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Tunai			
1	1	3	2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Non Tunai			
1	1	4		Lain-lain PAKalurahan			
1	1	4	1	Pungutan Kalurahan			
1	1	4	2	Pendapatan bunga			
1	1	4	3	Hasil penjualan/penghapusan aset/barang milik Kalurahan			
1	1	4	4	Pengelolaan tanah kas milik Kalurahan	1.000.000,00		
1	1	4	5	Pendapatan dari UPK	10.585.000,00		
1	1	4	6	Pendapatan denda sewa-menyewa aset Kalurahan			
1	1	4	7	Pendapatan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan			
1	2			Pendapatan Transfer	2.025.472.900,00		
1	2	1		Dana Kalurahan dari APBN	1.109.315.000,00		
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota			
1	2	2	1	Bagian hasil pajak daerah			
1	2	2	1	1	Bagian hasil pajak daerah	35.032.000,00	
1	2	2	1	2	Kekurangan bagian hasil pajak daerah tahun sebelumnya		
1	2	2	2		Bagian hasil retribusi daerah		
1	2	2	2	1	Bagian hasil retribusi daerah	35.032.000,00	
1	2	2	2	2	Kekurangan bagian hasil retribusi daerah tahun sebelumnya	6.718.100,00	
1	2	2	2	3	Bagian hasil penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan olah raga		
1	2	3		Alokasi Dana Kalurahan	679.215.800,00		
1	2	4		Bantuan Keuangan			
1	2	4	1	Bantuan Keuangan dari APBD DIY			
1	2	4	1	1	Bantuan pemberdayaan masyarakat Kalurahan		
1	2	4	1	2	Bantuan sarana prasarana kantor Kalurahan		
1	2	4	1	3	Bantuan pemberdayaan pariwisata/ budaya		
1	2	4	2		Bantuan APBD Kabupaten		
1	2	4	2	1	Bantuan keuangan untuk pembangunan padukuhan		
1	2	4	2	2	Bantuan keuangan untuk pembangunan Sarpras	160.160.000,00	
1	2	4	2	3	Bantuan bagi Pamong Kalurahan yang tidak punya tanah lungguh		
1	2	4	2	4	Bantuan pelaksanaan Perlombaan Kalurahan Tingkat DIY		
1	2	4	2	5	Bantuan pelaksanaan Perlombaan Kalurahan Tingkat Nasional		

1	2	4	2	6	Bantuan Kalurahan berprestasi dalam Perlombaan Kalurahan Tingkat Nasional		
1	2	4	2	7	Bantuan pelaksanaan TMMD		
1	2	4	2	8	Bantuan pembangunan pasar Kalurahan		
1	2	4	2	9	Bantuan pembangunan/rehabilitasi kantor Kalurahan		
1	2	4	2	10	Bantuan pelaksanaan Karya Bhakti TNI		
1	3				Pendapatan Lain lain	8.270.000,00	
1	3	1			Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat		
1	3	1	1		Hibah atau sumbangan dari perorangan		
1	3	1	2		Hibah atau sumbangan dari organisasi kemasyarakatan		
1	3	1	3		Hibah atau sumbangan dari perguruan tinggi		
1	3	1	4		Hibah atau sumbangan dari LSM		
1	3	1	5		Hibah atau sumbangan dari lembaga donor		
1	3	1	6		Hibah atau sumbangan dari perusahaan	5.000.000,00	
1	3	2			Lain-lain Pendapatan Kalurahan yang sah		
1	3	2	1		Hasil pengelolaan tanah kas Kalurahan		
1	3	2	2		Hasil kerjasama Kalurahan	270.000,00	
1	3	2	3		Bantuan perusahaan yang berlokasi di Kalurahan		
1	3	2	4		Insentif/hadiah Kalurahan lunas PBB		
1	3	2	5		Hadiah perlombaan		
1	3	2	6		Pengembalian atas temuan hasil pemeriksaan keuangan Kalurahan		
1	3	2	7		Hasil pelepasan tanah kas Kalurahan		
1	3	2	8		Bunga Bank	3.000.000,00	
					JUMLAH PENDAPATAN KALURAHAN	2.062.427.900,00	
2					BELANJA KALURAHAN		
1					Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	940.700.541,00	
1.1.01					Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	
1.1.02					Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	449.605.000,00	
1.1.03					Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.772.128,00	
1.1.04					Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	84.966.703,00	
1.1.05					Penyediaan Tunjangan BPD	60.981.360,00	
1.1.06					Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Seragam, Listrik dll)	2.420.000,00	
1.1.07					Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	27.524.700,00	
1.1.99					lain-lain sub bidang siltap dan operasional pemerintah desa	33.050.000,00	
1.2.02					Pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa	19.136.545,00	
1.2.3					Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor desa	102.400.000,00	
1.2.90					Pengadaan peralatan kerja	8.600.000,00	
1	2	91			Pengadaan meubelair	15.712.300,00	
1	2	94			Pemeliharaan kendaraan dinas	1.500.000,00	
1.2.95					Penyediaan jasa perbaikan/service peralatan kerja	3.200.000,00	
1.3.02					Penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil desa	1.300.000,00	
1.3.05					pendataan keluarga miskin	1.350.000,00	
1.3.90					Penyusunan monografi desa	800.000,00	
1.4.01					Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	-	
1.4.03					Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	3.015.005,00	
1.4.04					Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	8.380.000,00	
1.4.05					Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	11.105.000,00	
1.4.07					Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.280.000,00	
1.4.08					Pengembangan Sistem Informasi Desa	26.801.800,00	
1.4.91					Pengisian Perangkat Desa	-	
1.4.92					Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	-	
2					Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	966.506.697,00	
2.1.02					Dukungan penyelenggaraan PAUD	12.000.000,00	
2	1	90			Rehabilitasi Gedung PAUD	55.630.000,00	
2.2.01					Penyelenggaraan Pos Kesehatan desa/polindes milik desa	23.900.000,00	
2.2.02					Penyelenggaraan Posyandu	41.240.497,00	
2.2.04					Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	17.450.000,00	

2.2.06		Pengasuhan bersama/Bina Keluarga Balita (BKB)	-
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	5.754.000,00
2.3.1		Pemeliharaan prasarana jalan desa	
2.3.11		pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan permukiman	389.862.200,00
2.3.12		pemeliharaan jalan usaha tani	247.522.000,00
2.3.14		pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana Jalan desa (Gorong-gorong, selokan, dll)	55.604.000,00
2.3.15		pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai desa/kemasyarakatan	-
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	65.324.000,00
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	52.220.000,00
3		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	34.524.000,00
3.1.99		Lain-lain sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan linmas	6.750.000,00
3.3.93		lain-lain kegiatan sub bidang kepemudaan dan olahraga	6.975.000,00
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	5.414.000,00
3.4.95		Operasional LKMD/LPM/LPMKd	2.400.000,00
3.4.96		Operasional PKK	2.400.000,00
3.4.99		Lain-lain sub bidang kelembagaan masyarakat	10.585.000,00
4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	71.150.000,00
4.2.01		Peningkatan produksi tanaman pangan	71.150.000,00
5		Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	89.474.503,00
5.1.		penanggulanagan bencana	17.474.503,00
5.3.		penanganan keadaan mendesak	72.600.000,00
		JUMLAH BELANJA KALURAHAN	2.102.355.741,00
		SURPLUS/(DEFISIT)	(39.927.841,00)
		PEMBIAYAAN KALURAHAN	
		Penerimaan Pembiayaan	
		SILPA tahun sebelumnya	39.927.841,00
		Pencairan Dana Cadangan	
		Hasil penjualan kekayaan Kalurahan yang dipisahkan	
		Jumlah	39.927.841,00
		Pengeluaran Pembiayaan	
		Pembentukan Dana Cadangan	
		Penyertaan Modal Kalurahan	-
		Jumlah	-
		Pembiayaan Netto	-

Wunung, 30 Januari 2025
Lurah Wunung

LURAH WUNUNG

SUDARTO

lampiran II. Format Rincian Realisasi APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024

KODE KEKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN (Rp)	Lebih/(Kurang)	KET.
	PENDAPATAN KALURAHAN	2.062.427.900,00	2.052.839.370,00	(9.588.530,00)	99,54
1	Pendapatan Asli Kalurahan (PAKalurahan)	28.685.000,00	22.879.000,00	(5.806.000,00)	79,76
1 1	Hasil Usaha	-	-	-	
1 1 1	Bagian laba bersih BUMKalurahan	-	-	-	
1 2	Hasil Pengelolaan Aset Kalurahan	-	-	-	
1 2 1	Pengelolaan tanah milik Kalurahan	-	-	-	
1 2 2	Pasar Kalurahan	10.600.000,00	6.456.000,00	(4.144.000,00)	60,91
1 2 3	Bangunan milik Kalurahan	-	-	-	
	- Hasil menyewakan balai Kalurahan	2.000.000,00	588.000,00	(1.412.000,00)	
	- Hasil menyewakan ruang kantor Kalurahan	-	-	-	
	- Hasil menyewakan kios Kalurahan	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00
	- Hasil menyewakan gedung pertemuan	-	-	-	
	- Hasil menyewakan balai/panggung budaya	-	-	-	
1 2 4	Obyek rekreasi yang dikelola Kalurahan	-	-	-	
1 2 5	Pemandian umum yang dikelola Kalurahan	-	-	-	
1 2 6	Tambatan perahu	-	-	-	
1 2 7	Jaringan irigasi Kalurahan	-	-	-	
1 2 8	Lain-lain kekayaan milik Kalurahan	-	-	-	
1 3	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	-	-	
1 3 1	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Tunai	-	-	-	
1 3 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Non Tunai	-	-	-	
1 4 0	Lain-lain PAKalurahan	-	-	-	
1 4 1	Pungutan Kalurahan	-	-	-	
1 4 2	Pendapatan bunga	-	-	-	
1 4 3	Hasil penjualan/penghapusan aset/barang milik Kalurahan	-	-	-	
1 4 4	Pengelolaan tanah kas milik Kalurahan	1.000.000,00	750.000,00	(250.000,00)	
1 4 5	Pendapatan dari UPK	10.585.000,00	10.585.000,00	-	100,00
1 4 6	Pendapatan denda sewa-menyewa aset Kalurahan	-	-	-	
1 4 7	Pendapatan denda atas keterlambatan penyelesaian	-	-	-	
2	Pendapatan Transfer	2.025.472.900,00	2.021.460.950,00	(4.011.950,00)	99,80
2 1	Dana Kalurahan dari APBN	1.109.315.000,00	1.109.315.000,00	-	100,00
2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	-	-	-	
2 2 1	Bagian hasil pajak daerah	-	-	-	
2 2 1 1	Bagian hasil pajak daerah	35.032.000,00	35.032.000,00	-	100,00
2 2 1 2	Kekurangan bagian hasil pajak daerah tahun sebelumnya	-	-	-	
2 2 2	Bagian hasil retribusi daerah	-	-	-	
2 2 2 1	Bagian hasil retribusi daerah	35.032.000,00	35.032.000,00	-	100,00
2 2 2 2	Kekurangan bagian hasil retribusi daerah tahun	6.718.100,00	6.718.100,00	-	100,00
2 2 2 3	Bagian hasil penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan olah raga	-	-	-	
2 3	Alokasi Dana Kalurahan	679.215.800,00	675.203.850,00	(4.011.950,00)	99,41
2 4	Bantuan Keuangan	-	-	-	
2 4 1	Bantuan Keuangan dari APBD DIY	-	-	-	
2 4 1 1	Bantuan pemberdayaan masyarakat Kalurahan	-	-	-	
2 4 1 2	Bantuan sarana prasarana kantor Kalurahan	-	-	-	
2 4 1 3	Bantuan pemberdayaan pariwisata/ budaya	-	-	-	
2 4 2	Bantuan APBD Kabupaten	-	-	-	
2 4 2 1	Bantuan keuangan untuk pembangunan padukuhan	-	-	-	
2 4 2 2	Bantuan keuangan untuk pembangunan Sarpras	160.160.000,00	160.160.000,00	-	100,00
2 4 2 3	Bantuan bagi Pamong Kalurahan yang tidak punya tanah	-	-	-	
2 4 2 4	Bantuan pelaksanaan Perlombaan Kalurahan Tingkat DIY	-	-	-	
2 4 2 5	Bantuan pelaksanaan Perlombaan Kalurahan Tingkat	-	-	-	
2 4 2 6	Bantuan Kalurahan berprestasi dalam Perlombaan	-	-	-	
2 4 2 7	Bantuan pelaksanaan TMMD	-	-	-	
2 4 2 8	Bantuan pembangunan pasar Kalurahan	-	-	-	
2 4 2 9	Bantuan pembangunan/rehabilitasi kantor Kalurahan	-	-	-	
2 4 2 10	Bantuan pelaksanaan Karya Bhakti TNI	-	-	-	
3	Pendapatan Lain lain	8.270.000,00	8.489.420,00	229.420,00	102,77
3 1	Hibeh dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak	-	-	-	
3 1 1	Hibeh atau sumbangan dari perorangan	-	-	-	
3 1 2	Hibeh atau sumbangan dari organisasi kemasyarakatan	-	-	-	
3 1 3	Hibeh atau sumbangan dari perguruan tinggi	-	-	-	

3	1	4	Hibah atau sumbangan dari LSM	-	-	-	-
3	1	5	Hibah atau sumbangan dari lembaga donor	-	-	-	-
3	1	6	Hibah atau sumbangan dari perusahaan	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00
3	2		Lain-lain Pendapatan Kalurahan yang sah	-	-	-	-
3	2	1	Hasil pengelolaan tanah kas Kalurahan	-	-	-	-
3	2	2	Hasil kerjasama Kalurahan	270.000,00	270.000,00	-	100,00
3	2	3	Bantuan perusahaan yang berlokasi di Kalurahan	-	-	-	-
3	2	4	Insentif/hadiah Kalurahan lunas PBB	-	-	-	-
3	2	5	Hadiah perlombaan	-	-	-	-
3	2	6	Pengembalian atas temuan hasil pemeriksaan keuangan	-	-	-	-
3	2	7	Hasil pelepasan tanah kas Kalurahan	-	-	-	-
3	2	8	Bunga Bank	3.000.000,00	3.229.420,00	229.420,00	107,65
			JUMLAH PENDAPATAN KALURAHAN	2.062.427.900,00	2.052.839.370,00	(9.588.530,00)	99,54
			BELANJA KALURAHAN	2.102.355.741,00	2.026.359.147,00	(75.996.594,00)	96,39
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	940.700.541,00	891.654.947,00	(49.045.594,00)	94,79
1.01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	46.368.000,00	(432.000,00)	99,08
1.02			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	449.605.000,00	445.999.600,00	(3.605.400,00)	99,20
1.03			Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.772.128,00	30.772.128,00	-	100,00
1.04			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	84.966.703,00	75.610.359,00	(9.356.344,00)	88,99
1.05			Penyediaan Tunjangan BPD	60.981.360,00	60.981.360,00	-	100,00
1.06			Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, pakaian Seragam, Listrik dll)	2.420.000,00	2.420.000,00	-	100,00
1.07			Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	27.524.700,00	27.524.700,00	-	100,00
1.1.99			lain-lain sub bidang siltap dan operasional pemerintah desa	33.050.000,00	20.970.000,00	(12.080.000,00)	63,45
1.2.02			Pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa	19.136.545,00	13.356.000,00	(5.780.545,00)	69,79
1.2.3			Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor desa	102.400.000,00	102.400.000,00	-	100,00
1.2.90			Pengadaan peralatan kerja	8.600.000,00	8.600.000,00	-	100,00
1.2.91			Pengadaan meubelair	15.712.300,00	9.606.000,00	(6.106.300,00)	61,14
1.2.94			Pemeliharaan kendaraan dinas	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00
1.2.95			Penyediaan jasa perebaikan/service peralatan kerja	3.200.000,00	1.800.000,00	(1.400.000,00)	56,25
1.3.02			Penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil desa	1.300.000,00	-	(1.300.000,00)	-
1.3.05			pendataan keluarga miskin	1.350.000,00	1.350.000,00	-	-
1.3.90			Penyusunan monografi desa	800.000,00	800.000,00	-	100,00
1.4.01			Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDDes (Reguler)	-	-	-	#DIV/0!
1.4.03			Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	3.015.005,00	1.810.000,00	(1.205.005,00)	60,03
1.4.04			Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDDes, APBDDes Perubahan, LPJ dll)	8.380.000,00	8.380.000,00	-	100,00
1.4.05			Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	11.105.000,00	10.075.000,00	(1.030.000,00)	90,72
1.4.07			Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi	1.280.000,00	1.280.000,00	-	100,00
1.4.08			Pengembangan Sistem Informasi Desa	26.801.800,00	20.051.800,00	(6.750.000,00)	74,82
1.4.91			Pengisian Perangkat Desa	-	-	-	-
1.4.92			Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	-	-	-	-
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	966.506.697,00	959.905.200,00	(6.601.497,00)	99,32
2.1.02			Dukungan penyelenggaraan PAUD	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00
2.1			Rehabilitasi Gedung PAUD	55.630.000,00	55.630.000,00	-	100,00
2.2.01			Penyelenggaraan Fos Kesehatan desa/polindes milik desa	23.900.000,00	23.900.000,00	-	100,00
2.2.02			Penyelenggaraan Posyandu	41.240.497,00	38.640.000,00	(2.600.497,00)	93,69
2.2.04			Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	17.450.000,00	13.600.000,00	(3.850.000,00)	77,94
2.2.06			Pengasuhan bersama/Bina Keluarga Balita (BKB)	-	-	-	-
2.2.91			Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	5.754.000,00	5.604.000,00	(150.000,00)	97,39
2.3.1			Pemeliharaan prasarana jalan desa	-	-	-	-

3.11		pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jalan lingkungan permukiman	389.862.200,00	389.862.200,00	-	100,00
3.12		pemeliharaan jalan usaha tani	247.522.000,00	247.522.000,00	-	100,00
3.14		pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (Gorong-gorong, selokan, dll)	55.604.000,00	55.603.000,00	(1.000,00)	100,00
3.15		pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai desa/kemasyarakatan	-	-	-	-
3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	65.324.000,00	65.324.000,00	-	100,00
4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	52.220.000,00	52.220.000,00	-	100,00
		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	34.524.000,00	23.199.000,00	(11.325.000,00)	67,20
1	99	Lain-lain sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan linmas	6.750.000,00	-	(6.750.000,00)	-
1	0	lain-lain kegiatan sub bidang kepemudaan dan olahraga	6.975.000,00	2.400.000,00	(4.575.000,00)	34,41
1	0	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	5.414.000,00	5.414.000,00	-	-
1	0	Operasional LKMD/LPM/LPMKad	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00
1	0	Operasional PKK	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00
1	0	Lain-lain sub bidang kelembagaan masyarakat	10.585.000,00	10.585.000,00	-	-
4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	71.150.000,00	71.150.000,00	-	100,00
4.2.01		Peningkatan produksi tanaman pangan	71.150.000,00	71.150.000,00	-	100,00
5		Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	89.474.503,00	80.450.000,00	(9.024.503,00)	89,91
5.1		penanggulangan bencana	17.474.503,00	8.450.000,00	(9.024.503,00)	48,36
5.3		penanganan keadaan mendesak	72.000.000,00	72.000.000,00	-	100,00
		JUMLAH BELANJA KALURAHAN	2.102.355.741,00	2.026.359.147,00	(75.996.594,00)	96,39
		SURPLUS/(DEFISIT)	(39.927.841,00)	26.480.223,00	66.408.064,00	(66,32)
		PEMBIAYAAN KALURAHAN				
		Penerimaan Pembiayaan	39.927.841,00	39.927.841,00	-	100,00
		SILPA tahun sebelumnya	39.927.841,00	39.927.841,00	-	100,00
		Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
		Hasil penjualan kekayaan Kalurahan yang dipisahkan	-	-	-	-
		Jumlah	-	-	-	-
		Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-
		Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
		Jumlah	-	66.408.064,00		
		Pembiayaan Netto	0	66.408.064,00		



**REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK KALURAHAN WUNUNG
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PER 31 DESEMBER 2024**

NO	PADUKUHAN	JUMLAH (jiwa)		JUMLAH (jiwa)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Kamal	780	804	1.584
2.	Wunung	151	170	321
3.	Teguhan	508	500	1.008
4.	Soka I	229	226	455
5.	Soka II	238	218	456
	JUMLAH TOTAL	1.947	1.969	3.916

